

**PENERAPAN MANDATORY ROUTE FOR TANKER SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT, KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PELAYARAN PADA SEA LINES OF
COMMUNICATION INDONESIA**

INTISARI

Oleh:

Siti Rahma Novikasari* dan Marsudi Triatmodjo**

Peningkatan pelayaran kapal tanker pada *sea lines of communication* Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman bagi keamanan, keselamatan pelayaran dan lingkungan laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan dampak penerapan *mandatory route for tanker* bagi keamanan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut pada *sea lines of communication* Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer. Wawancara dilakukan untuk mendukung argumentasi dalam menganalisis data secara kualitatif dengan metode deduktif. Serta dilakukan pendekatan komparasi untuk melihat optimalisasi penerapan system rute kapal di Belanda yaitu *mandatory route for tanker from north hinder to german bight and vice versa*.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa penerapan *mandatory route for tanker* urgen untuk diterapkan di perairan Indonesia ditinjau dari pendekatan prinsip *maritime security* bagi keamanan pelayaran, keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan laut ditinjau dari prinsip *freedom of navigation, flag-state enforcement, sustainable development, preventive action* dan *precautionary principal*. Penerapan *mandatory route for tanker* juga memberikan keuntungan baik bagi pelaku pelayaran tanker, non-tanker, serta bagi pemerintah.

Sistem hukum nasional secara substansi huku dan struktur hukum telah memberikan peluang besar dalam penerapan *mandatory route for tanker*. Budaya hukum menjadi aspek yang perlu ditingkatkan, dengan mengadopsi budaya hukum optimalisasi penerapan sistem rute kapal oleh Belanda untuk mewujudkan pembangunan kelautan nasional yang integral.

Kata Kunci: Sistem Rute, SOLAS 1974, Keamanan Pelayaran, Keselamatan Pelayaran, Perlindungan Lingkungan Laut.

* Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Internasional, Fakultas Hukum UGM

** Guru Besar pada Departemen Internasional Fakultas Hukum UGM

**IMPLEMENTATION OF MANDATORY ROUTE FOR TANKER AS
EFFORT TO MARINE PROTECTION, SAFETY AND SECURITY OF
NAVIGATION AT INDONESIA'S SEA LINES OF COMMUNICATION**

ABSTRACT

By:

Siti Rahma Novikasari dan Marsudi Triatmodjo

The increase of tanker navigation at Indonesia's sea line of communication is directly proportional to the increased threat to safety, security of navigation and the marine environment. This research aims to determine the urgency and impact of the implementation of mandatory route for tanker for the safety, security of navigation and protection of the marine environment at Indonesia's sea line of communication.

This research type is normative with literature study to get the primary data source. Interview were conducted to support the argument to analyze the data qualitatively with deductive methods. Comparative approach was conducted observe the optimization of the implementation of ship routes system in the Netherlands namely mandatory route for tanker from north hinder to German bight and vice versa.

The results show that the implementation of mandatory route for tanker is urgent to apply territorial waters of Indonesia if reviewed from approach of maritime security principle for security navigation, safety navigation, as well as the protection of the marine environment in terms of principles freedom of navigation, flag-state enforcement, sustainable development, preventive action and precautionary principal. The implementation of mandatory route for tanker also provide benefits for tankers, non-tankers and government.

The national legal system on legal substance and the legal structure has provided great opportunities to implementing mandatory route for tanker. The legal culture becomes an aspect that needs to be improved, by adopting a legal culture of optimizing the implementation of The Netherland's ship routeing sytem to embody the integrated national marine development.

Keywords: Routeing System, SOLAS 1974, Security of Navigation, Safety of Navigation, Marine Protection.